

**ANALISIS HIERARKI, INTERAKSI, DAN SEKTOR BASIS
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2019**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi**

Oleh :

FERDIAN BUDI AR-ROUF

E100150216

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS HIERARKI, INTERAKSI, DAN SEKTOR BASIS KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2019

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

FERDIAN BUDI AR-ROUF

E100150216

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing,



Dr. ChoirulAmin S.Si. M.M

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS HIERARKI, INTERAKSI, DAN SEKTOR BASIS KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2019

Oleh :

Ferdian Budi Ar-rouf
NIM : E100150216

Telah dipertahankan di dapan Dewan Penguji
Program Studi Geografi
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 31 Juli 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Choirul Amin S.S.i. MM**
(Ketua Dewan Penguji)


(.....)

2. **Dr. M. Musiyam, M.TP**
Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

3. **Aditya Saputra, M.Sc. Ph.D**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)



Dekan

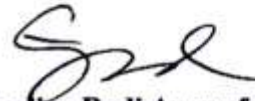

Drs. Yuli Priyana M.Si
NIK.573

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Aoabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta 14 Agustus 2019
Penulis



Ferdian Budi Ar-rouf
E100150216

ANALISIS HIERARKI, INTERAKSI, DAN SEKTOR BASIS KABUPATEN JOMBANG

Abstrak

Pertumbuhan kota yang selalu meningkat dari waktu ke waktu tidak bisa dihindari. Pertumbuhan ini akan menimbulkan banyak masalah jika tidak terjadi pemerataan pembangunan. Kabupaten Jombang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) GERMAKERTOSUSILA Plus. Dengan demikian maka Kabupaten Jombang akan Menjadi wilayah pusat pertumbuhan, serta pertumbuhan yang baik adalah faktor pemerataan diseluruh wilayah. Tujuan penelitian untuk menentukan kecamatan yang akan menjadi pusat kegiatan masyarakat, yang kedua menganalisis kekuatan daya tarik antar wilayah dan menentukan sektor basis dan non basis ekonomi dengan jumlah sample penelitian sebanyak 21 kecamatan. Metode yang digunakan ada tiga, yaitu metode skalogram dengan hasil hierarki tiap wilayah, kedua dengan metode gravitasi dengan hasil kemampuan daya tarik tiap kecamatan, dan ketiga metode *Location Qoutions* dengan hasil sektor basis dan non basis tiap kecamatan di Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, di Kabupaten Jombang terdapat 8 wilayah yang bisa menjadi pusat pertumbuhan, kecamatannya meliputi Diwek, Gudo, Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Peterongan, Ploso. Sedangkan terdapat wilayah yang terbelakang dengan hierarki IV dan V diantaranya adalah Kecamatan Wonosalam, Kabuh dan Bareng. Untuk Kekuatan daya tarik wilayah dengan kategori sangat kuat dimiliki Kecamatan Jombang dan Diwek, dengan wilayah terkategori sangat lemah Kecamatan Kabuh, Kudu, Ngusikan, dan Wonosalam. Sedangkan untuk basis ekonomi, basis ekonomi dengan 10 sektor dimiliki Kecamatan Jombang, lalu disusul basis ekonomi dengan 9 sektor pada Kecamatan Ploso dan Megaluh. Untuk kategori basis ekonomi yang merata adalah pertanian, Tambang galian, Kontruksi, Real Estate, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Sosial.

Kata Kunci: Geografi Regional, Perencanaan Wilayah, Hierarki Wilayah, Interaksi Wilayah, dan Sektor Basis Ekonomi Wilayah

Abstract

The frequently increasing of urban growth could not be avoided. That growth potentially caused many problems if the development equity of the region could not be reached. The Jombang District belonged to Strategic Development Region (WPS) GERMAKERTOSUSILA Plus. The good growth as an equity factor of over the region could influence it to be the center of growth. The research aimed not only to determine where the center of public activity was, but also to analyze interregional pull factor and to determine the basis of economic sector and non-basis of economic sector using samples total of 21 subdistricts. The research used 3 methods. First, it used scalogram method by hierarchy basis for each region. Second, it used gravitation method by pull factor by each subdistrict. Third, it

used Location Quotients method by using basis of economic sector and non-basis of economic sector for each subdistrict of Jombang District. The results showed that there were 8 subdistricts of Jombang District potentially being the center of growth including Diwek, Gudo, Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Peterongan, and Ploso. Meanwhile, there were the less developed subdistricts including Wonosalam, Kabuh and Bareng. Both Jombang Subdistrict and Diwek Subdistrict belonged to the regions which had the strongest interregional pull factor. The subdistrict belonged to the regions having the weakest interregional pull factor were Kabuh, Kudu, Ngusikan, and Wonosalam. Jombang subdistrict had 10 sectors of economic basis. It was followed by Ploso subdistrict and Megaluh subdistrict which had 9 sectors of economic basis, respectively. For the basic economic categories that are evenly distributed are agriculture, mining, construction, real estate, education services, health and social services

Keyword: Regional Geography, Regional Development, Region Hierarchy, Regional Interaction, Regional Economic Basis Sector.

1. PENDAHULUAN

Pemikiran tentang perencanaan pembangunan hampir sama dengan ekonomi pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah strategi pemikiran yang ampuh dalam melaksanakan program pembangunan yang terkoordinasi. Isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan, selalu menjadi perbincangan hangat terutama kesenjangan wilayah. Sampai saat ini kesenjangan terpusat pada kesenjangan desa dan kota, kawasan timur dan kawasan barat Indonesia. Kesenjangan yang tercipta lahir karena banyak faktor seperti, pembangunan sarana publik, transportasi, pembangunan kegiatan ekonomi, dan sebagainya.

Pembangunan wilayah tidak bisa dihindari. Solusi pada wilayah pertumbuhan sangat tergantung pada program pembangunan wilayah kota yang efektif mengenai pembangunan sarana publik dan manajemen yang ada. Perencanaan wilayah harus mempertimbangkan keadaan lingkungan, demografi, ekonomi dan keadaan sosial secara spasial dan hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakatnya.

Kelengkapan fasilitas publik memegang peranan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dampaknya akan menekan kesenjangan wilayah. Daerah Kabupaten Jombang yang tergabung dalam Wilayah

Pengembangan Stategis (WPS) GERMAKERTOSUSILA Plus dengan pusat Kota Surabaya secara langsung tentu dituntut kelengkapan fasilitas publik, sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat. dalam peraturan Rancangan Tata Ruang Wilayah tahun 2009 Sistem Wilayah Pengembangan Kabupaten Jombang dalam melayani administrasi masyarakatnya terbagi menjadi lima Wilayah Pengembangan, meliputi Kecamatan Jombang, Mojoagung, Ploso, Bandar Kedungmulyo, dan Mojowarno. Fungsi WP Kabupaten Jombang sebagai Wilayah Pengembangan fungsi yang diharapkan sebagai ibu kota kabupaten dan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala kabupaten. Kegiatan utama WP tergolong menjadi kegiatan ekonomi dan non ekonomi. Pengembangan sektor ekonomi dalam perdagangan dan industri secara terbatas pada lokasi yang telah ada dengan skala kegiatan sampai dengan menengah serta luasan lokasi secara terbatas. Sedangkan kegiatan bukan ekonomi berupa kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang pada hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 1.205.114, dan ditahun 2017 menjadi 1.253.078 mengalami peningkatan hampir 50 ribu penduduk. Laju pertumbuhan penduduk wilayah ini dari tahun 2010 - 2017 mencapai 3,98% dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunnya sebesar 0,46%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar dari tahun 2010-2017 adalah Kecamatan Jogoroto dengan 8,21% , disusul Kecamatan Jombang 6,21%, Sumobito 5,62%. Oleh karena itu akibat peningkatan jumlah penduduk diperlukan pula peningkatan fasilitas publik yang tersedia di masing – masing wilayah demi mendorong dan melayani kebutuhan masyarakat yang beragam.

2. METODE

2.1 Jenis dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah Penelitian Sekunder. Hasil dari penelitian ini disebut sebagai Analisis Data Sekunder yang mengartikan terdapat prosedur pengumpulan data dan analisis data. Metode ini termasuk strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk

menemukan permasalahan baru untuk diteliti serta memunculkan ide-ide baru, dalam penelitian (Mc Caston, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah 1) Fasilitas sosial dan ekonomi yang terdiri dari fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Klinik, Apotek), Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA), fasilitas peribadatan (Masjid, Musholla, Gereja Katolik, Gereja Potestan, Klenteng), dan fasilitas industri (Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil), 2). Angka penduduk daerah asal dan daerah tujuan, 3). Jarak antar kecamatan, dan 4). Data PDRB Kabupaten Jombang. Penelitian ini seluruhnya menggunakan Data Sekunder yang bersumber dari lembaga pemerintahan. Penelitian menggunakan Metode Skalogram, Metode Gravitasi dan Metode LQ. Data yang digunakan seluruhnya digunakan dan diolah dalam perhitungan matematis serta hasil dianalisis secara deskriptif. Metode pengolahan data menggunakan metode skalogram, gravitasi dan *location quotient* (LQ).

2.2 Metode Pengolahan Data

2.2.1 Skalogram

Metode ini menggunakan semua fasilitas umum yang masuk dalam populasi yang dimiliki setiap wilayah dengan ditotal dan dirangkai dalam tabel. Metode ini menunjukkan ada atau tidaknya jenis fasilitas disuatu wilayah. Penghitungan metode ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1)Membuat tabel kelengkapan fasilitas publik,
- 2)Melakukan Uji kelayakan Skalogram dengan rumus *Coeffisient of Reproducibility* (COR) ;

$$COR = 1 - \frac{\sum n \times k \times e}{n \times k} \quad (1)$$

Keterangan ;

E = Jumlah Kesalahan atau Error

N = Jumlah Subyek atau Wilayah yang diteliti

K = Jumlah Obyek atau Fasilitas yang diteliti

- 3)Melakukan Pembobotan Fasilitas Menggunakan *Weight Hight Centraliy Index* (WHCI) ;

$$C = \frac{t}{T} \quad (2)$$

Keterangan ;

C = Bobot Fasilitas

t = Nilai Fasilitas Tiap Jenis

T = Jumlah Satuan Jenis Fasilitas

- 4) Pengembangan Skalogram ke Indeks Sentralitas Marshall. Bobot fasilitas dari WHCI akan di jumlah tiap kecamatannya untuk mendapatkan nilai Indeks Sentralitas tiap kecamatannya,
- 5) Hasil pembobotan fasilitas dihitung kembali untuk menentukan hierarki wilayah, dimulai dari menentukan banyaknya kelas atau orde dan mengetahui berapa interval tiap hierarkinya. Penghitungan penentuan hierarki dapat dilakukan sebagai berikut ;

$$k = 1 + 3,3 \log n \quad (3)$$

Keterangan :

K=Banyaknya kelas.

N=banyaknya kecamatan.

$$\frac{A-B}{k} \quad (4)$$

Keterangan ;

A=Jumlah fasilitas tertinggi.

B=Jumlah fasilitas terendah.

K= Banyaknya kelas

2.2.2 Gravitasi

Cara Gravitasi sering dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Cara ini dapat memudahkan suatu perencanaan mengetahui kemampuan daya tarik wilayah terhadap wilayah lain. Penghitungan dapat dilakukan sebagai berikut ;

$$A_{ij} = k \frac{P_i \cdot P_j}{d_{ij}^b} \quad (5)$$

Keterangan ;

A_{ij} = Kemampuan interaksi i ke j

P_i =Total penduduk di wilayah i,

P_j =Total penduduk di wilayah j,

D_{ij} =Jarak antar kedua wilayah i dengan wilayah j, dalam km.

K =sebuah bilangan konstan.

b =pangkat dari d_{ij} b=2.

2.2.3 Location Quotients (LQ)

Location Quotient (LQ) dapat dimanfaatkan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi apa yang termasuk dalam basis dan *non* basis dalam suatu wilayah administratif yang sama. Hasil kalkulasi metode ini jika $LQ > 1$ maka tergolong sektor basis, sedangkan jika hasil menunjukkan $LQ < 1$ maka tergolong bukan sektor basis. Rumus untuk menghitung basis ekonomi sektoral sebagai berikut ;

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \text{ atau } LQ = \frac{v_i/V_i}{v_t/V_t} \quad (6)$$

Dimana ;

v_i = Jumlah Pendapatan Sektor Ekonomi .

v_t = Jumlah Pendapatan PDRB .

V_i = Jumlah Pendapatan Ekonomi wilayah referensi.

V_t = Jumlah Pendapatan PDRB wilayah referensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Hierarki Wilayah Kabupaten Jombang

Hasil Hierarki terbagi menjadi lima orde, yang tersusun dari orde I hingga V. Susunan ini dibentuk dari nilai total indeks sentralitas *Marshall* yang didapat dari tabel skelogram dan telah diklasifikasikan penggolongannya dengan metode *Struges*. Hasil hierarki dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

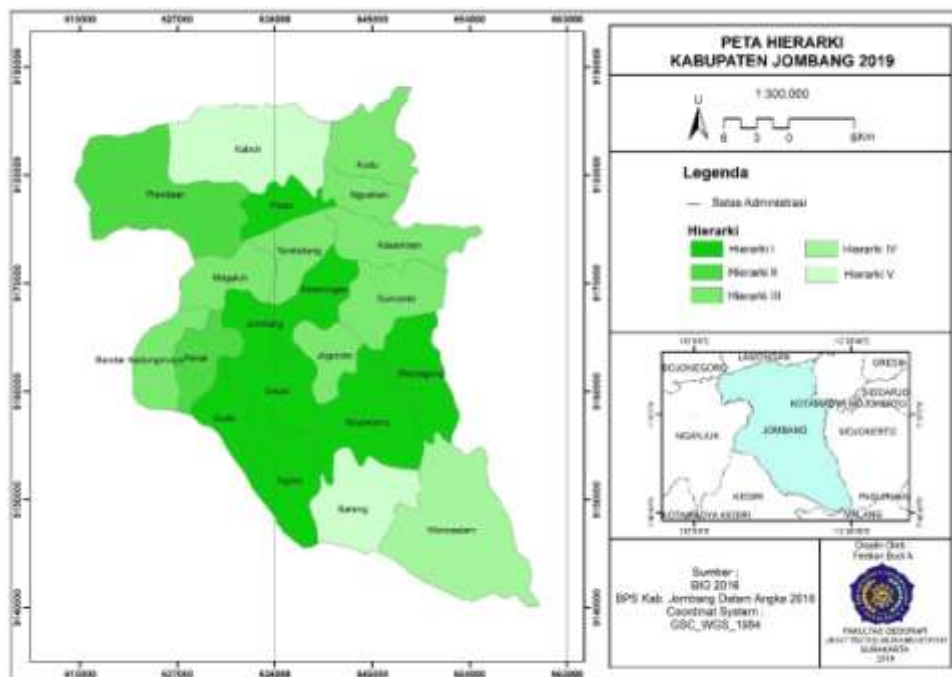
Tabel 1. Penggolongan Hierarki tiap Kecamatan di Kabupaten Jombang.

Tingkat Hierarki	Nilai Sentralitas	Kecamatan	Penggolongan
Hierarki I	84.86 – 90.21	Diwek, Gudo, Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Peterongan, Ploso	PKL
Hierarki II	79.49 – 84.85	Perak, dan Plandaan	PPK
Hierarki III	74.12 – 79.48	Bandar Kedungmulyo, Kudu, Jogoroto, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Ngusikan, dan Sumobito	PPL

Tingkat Hierarki	Nilai Sentralitas	Kecamatan	Penggolongan
Hierarki IV	68.75 – 74.11	Wonosalam	Hinterland
Hierarki V	63.38 – 68.74	Kabuh, Bareng	Hinterland

Sumber : Pengolahan Data, 2019.

Tabel satu menunjukkan penggolongan Hierarki di Kabupaten Jombang. Hasil menunjukkan bahwasannya pusat pertumbuhan tidak hanya satu kecamatan namun terdapat delapan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan. Namun masih ditemukan wilayah yang tergolong tertinggal dalam pembangunan fasilitas publik yaitu kecamatan Wonosalam, Kabuh dan Bareng. Gambar 1 menunjukkan persebaran hierarki di Kabupaten Jombang ;



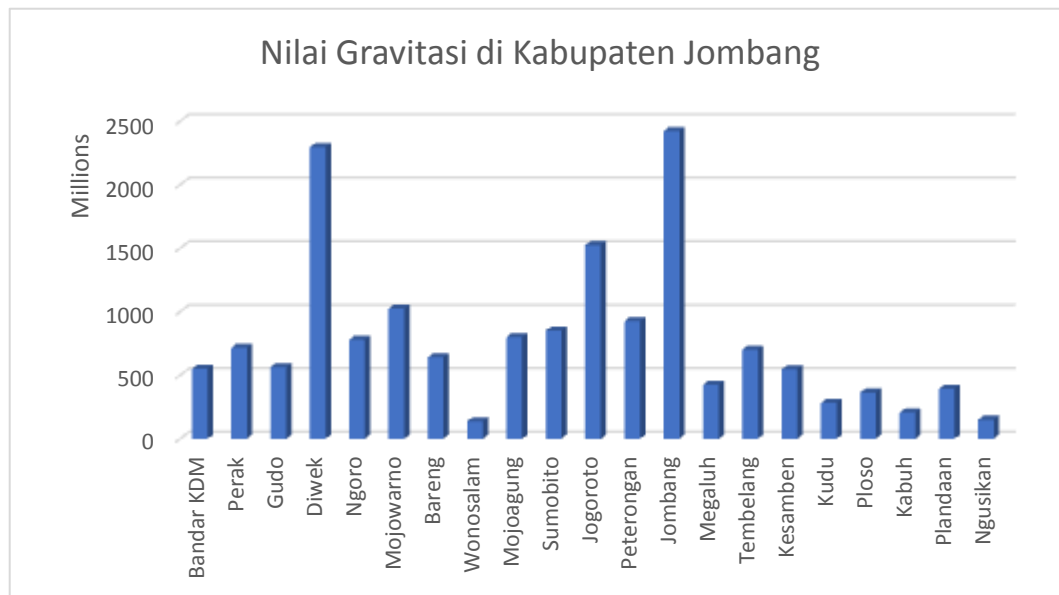
Gambar 1. Persebaran Hierarki Kabupaten Jombang
Sumber : Pengolahan Data, 2019.

Gambar 1 menunjukkan persebaran hierarki di Kabupaten Jombang. Nilai hierarki ditunjukkan dengan kepekatan warna hijau. Jika dilihat dengan seksama kecamatan hierarki I saling bersebelahan satu sama lain kecuali Kecamatan plosopo.

Untuk hierarki III juga saling bersebelahan satu sama lain, serta mengelilingi wilayah hierarki I dan II, wilayah ini adalah Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Megaluh, Tembelang, Kudu, Ngusikan, Kesamben, Sumobito, dan Jogorogo. Hierarki satu terdiri dari delapan kecamatan, maka kecamatan yang tergolong pada hierarki ini dapat memfasilitasi kecamatan hierarki dua hingga lima. Jika dikalkulasi pembagiannya secara merata maka tiap kecamatan hierarki satu dapat menampung satu hingga dua kecamatan yang berada di bawahnya. Dicontohkan seperti Kecamatan Bareng, kecamatan ini tergolong pada hierarki 5 maka kecamatan bareng bisa ditopang oleh kecamatan dengan hierarki yang berada di atasnya yaitu Wonosalam, bahkan bisa ditopang lagi dengan wilayah hierarki tertinggi karena bersebelahan wilayahnya pada Kecamatan Ngorok ataupun Mojowarno. Sama dengan Kecamatan Kabuh meskipun hierarkinya rendah, kekurangan fasilitas publik yang dimiliki, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka dapat ditopang Kecamatan Plandaan ataupun Ploso.

3.2 Analisis Gravitasi

Faktor kemudahan akses akan memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kegiatan ekonomi dan sosial. Hal ini karena akan menunjukkan tingkat kemudahan dan kelancaran perpindahan orang atau barang dari suatu wilayah terhadap wilayah yang lainnya. Melihat perbedaan antar wilayah dalam pusat pertumbuhan di Kabupaten Jombang. Model ini banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu wilayah terhadap wilayah disekitarnya. Berikut gambar 2 adalah data grafik nilai interaksi di Kabupaten Jombang:



Gambar 2. Nilai Gravitasi Kabupaten Jombang
Sumber : Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan Kecamatan Jombang berada paling tinggi dalam hasil nilai daya tarik antar wilayahnya. Hal ini didapatkan karena Kecamatan Jombang dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Jombang dengan jumlah 146.128 jiwa, dengan letak geografi yang berada ditengah wilayah Kabupaten Jombang, serta bersebelahan dengan kecamatan Diwek, Sumobito, Mojowarno, Mojoagung, Jogoroto dan Peterongan dengan jumlah penduduk masing-masing 106.119, 81.568, 89.198, 77.198, 68.293, dan 67.656 jiwa, serta wilayahnya yang tidak terlalu jauh dari Kecamatan Jombang dengan masing - masing jaraknya 4.33, 12.68, 11.9, 11.97, 5.77, 7.06 km, menyebabkan nilai daya tarik yang semakin besar untuk kecamatan ini. Disusul Kecamatan Diwek diposisi kedua dan kecamatan Jogoroto diposisi ke tiga.

Berbeda dengan wilayah - wilayah yang berada dibatas terluar administrasi Kabupaten Jombang, seperti Kecamatan Plandaan, Wonosalam, Kudu, Ploso, Ngusikan, dan Kabuh. Kecamatan terluar ini masing - masing menempati peringkat ke 16, 21, 18, 17, 20 dan 19. Kecamatan ini masing-masing berpenduduk 35.619, 31.955, 28.589, 39.690, 21.420, dan 39.656 jiwa. Maka dengan faktor jumlah penduduk yang kecil serta wilayah kecamatan secara administratif berada dibatar terluar Kabupaten Jombang, maka hubungan jarak

antar kecamatan yang lain dengan penduduk yang tinggi seperti Kecamatan Jombang, Diwek, Jogoroto, Mojoagung juga besar. Hal ini yang mempengaruhi kecilnya kemampuan daya tarik di wilayah yang berada pada daerah perbatasan Kabupaten Jombang. Hal ini menunjukkan bahwa jika melihat pada daerah yang berada ditengah wilayah administratif, karena akses ke wilayah manapun dekat serta dipengaruhi dengan banyaknya penduduk maka, hal ini yang menyebabkan ketimpangan yang terjadi antar wilayah di Kabupaten Jombang.

3.3 Analisis Location Quotients (LQ)

Location Quotients (LQ) dipergunakan untuk mengetahui sektor ekonomi apa yang menjadi potensi dan tidak berpotensi dalam suatu wilayah. Basis ekonomi didapat dari penghitungan pendapat sektor ekonomi dari PDRB di kecamatan dibagi dengan PDRB sektor yang sama di Kabupaten Jombang sebagai pembandingnya, dan dibagi lagi dengan total PDRB di kecamatan terkait dengan PDRB total kabupaten. Berikut hasil penghitungan LQ ditiap Kecamatan di Kabupaten Jombang:

Tabel 2. Basis Ekonomi Tiap Kecamatan di Kabupaten Jombang

No	Kecamatan	Kategori Basis Ekonomi	Jumlah Sektor
1	Bandar Kedungmulyo	A, F, J, L, P, Q, R, S, T, U	7
2	Perak	A, C, F, L, P, Q, R, S, T, U	7
3	Gudo	A, F, K, L, P, Q, R, S, T, U	7
4	Diwek	C, F, M, N, P, Q	5
5	Ngoro	C, D, J, M, N, P, Q	6
6	Mojowarno	A, C, F, P, Q	5
7	Bareng	A, F, L, P, Q	5
8	Wonosalam	A, L, R, S, T, U	3
9	Mojoagung	C, D, G, I, M, N	5
10	Sumobito	A, C, F, L, P, Q, R, S, T, U	7
11	Jogoroto	A, F, G, H, I, L, P, Q	8
12	Peterongan	G, I	2
13	Jombang	C, D, E, G, H, I, J, K, M, N, O	10
14	Megaluh	A, B, F, I, L, O, P, Q, R, S, T, U	9
15	Tembelang	A, F, J, L, P, Q, R, S, T, U	7
16	Kesamben	B, F, J, L, P, Q, R, S, T, U	7
17	Kudu	A, B, I, J, R, S, T, U	8
18	Ngusikan	A, B, K, O, Q, R, S, T, U	6
19	Ploso	B, D, G, H, I, J, K, L, R, S, T, U	9
20	Kabuh	A, B, F, M, N, P, Q, R, S, T, U	8
21	Plandaan	A, B, F, P, Q, R, S, T, U	6

Sumber : Pengolahan Data, 2019.

Tabel 2 kecamatan yang memiliki basis ekonomi terbanyak adalah kecamatan Jombang dengan jumlah sektor sebanyak 10 sektor ekonomi. Sepuluh sektor ekonomi ini yaitu 1). Industri Pengolahan, 2). Pengadaan Listrik dan Gas, 3). Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang, 4). Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 5). Transportasi dan Pergudangan, 6). Penyediaan Akomodasi dan Air Minum, 7). Informasi dan Komunikasi, 8). Jasa Keuangan Asuransi, 9). Jasa Perusahaan, dan 10). Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jasa Sosial Wajib. Selanjutnya disusun dengan Kecamatan Megaluh dan Ploso dengan 9 sektor basis ekonomi. Untuk Kecamatan terendah dengan hanya memiliki dua basis ekonomi yaitu Kecamatan Peterongan dengan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dan Penyediaan Akomodasi dan Air Minum. Jika di ambil secara

rata-rata jumlah sektor ekonomi di Kabupaten Jombang ini berkisar antara 7- 8 sektor basis ekonomi.

PDRB Kabupaten Jombang memiliki tiga sektor ekonomi yang tidak dapat diunggulkan di tiap kecamatannya, sektor itu berupa, 1). Pengadaan Listrik dan Gas (D), 2). Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang (E), serta 3). Transportasi Pergudangan (H). Masing-masing menyumbang Rp. 19.472.800.000, Rp. 21.106.800.000, Rp. 261.910.000.000.

Pendapatan daerah dengan kategori D hanya diperoleh dari empat kecamatan yaitu Ngoro, Mojoagung, Jombang, dan Ploso. Sedangkan pendapatan untuk kategori E hanya didapatkan di Kecamatan Jombang. Serta pendapat sektor dengan kategori H diperoleh dari tiga kecamatan yaitu Jogoroto, Jombang, dan Ploso. Untuk memudahkan penggolongan sektor-sektor ekonomi yang sama tertuang pada tabel 3 berikut ini ;

Tabel 3. Penggolongan Basis Ekonomi

No	Kategori Basis Ekonomi	Wilayah Kecamatan	Jumlah Kecamatan
1	A	Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Sumobito, Jogoroto, Megaluh, Tembelang, Kudu, Ngusikan, Kabuh, Plandaan.	14
2	B	Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh, Plandaan.	8
3	C	Perak, Diwek, Ngoro, Mojowarno, mojoagung, sumobito, dan Jombang.	7
4	D	Ngoro, Mojoagung, Jombang, dan Ploso	4
5	E	Jombang.	1
6	F	Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Bareng, Sumobito, Jogoroto, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.	12

No	Kategori Basis Ekonomi	Wilayah Kecamatan	Jumlah Kecamatan
7	G	Mojoagung, Sumobito, Jogorot, Peterongan, Jombang, dan Ploso.	6
8	H	Jogorot, Jombang, dan Ploso.	3
9	I	Mojoagung, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Kudu dan Ploso.	7
10	J	Jombang, Tembelang, Kesamben, Kudu, dan Ploso.	5
11	K	Gudo, Jombang, Ngusikan, dan Ploso .	4
12	L	Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Bareng, Wonosalam, Sumobito, Jogoroto, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Ploso.	11
13	M,N	Diwek, Ngoro, Mojoagung, Jombang, dan Kabuh.	5
14	O	Jombang, Megaluh, Ngusikan.	3
15	P	Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Bareng, Sumbito, Jogoroto, Megaluh, Kesamben, Kudu, Kabuh, dan Plandaan.	14
16	Q	Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Ngoro, Mojowarno, Bareng, Sumobito, Jogoroto, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Ngusikan, Kabuh, dan Plandaan	15
17	R,S,T,U	Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Wonosalam, Sumobito, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan	13

Sumber : Pengolahan Data, 2019.

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terjadi pemerataan dalam pendapatan sektor PDRB. Dari tabel ini dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang harus dikembangkan kedepan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Jika diambil rata

- rata yang didapat dari jumlah dari kategori basis ekonomi didapatkan angka 7.76, maka dapat direpresentasikan bahwa batas bawah pemerataan sektor ekonomi harus ada minimal 7 hingga 8 kecamatan di Kabupaten Jombang. Adapun kategori sektor ekonomi yang harus didorong adalah D, E, H, J, K, M, N, dan O.

3.4 Masukan Kebijakan Kabupaten Jombang Berdasarkan Hasil Analisis

Ditinjau dari data RPJMD kabupaten Jombang tahun 2014 - 2019 tentang potensi pengembangan wilayah yang meliputi kecamatan Mojowarno, Mojoagung, Bandar Kedungmulyo, Perak, Tembelang dan Ploso maka jika disatukan dengan data hasil hierarki I yang terdiri dari Diwek, Gudo, Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Peterongan, Ploso, kedua data ini menunjukkan bahwa target potensi wilayah di Kabupaten Jombang Belum terpenuhi. Kecamatan yang meleset yang tak termasuk dalam hierarki I dari rancangan RPJMD adalah Diwek, Gudo, Bandar kedungmulyo, Perak dan Tembelang.

Penataan ruang suatu wilayah merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Usaha dalam peningkatan kesejahteraan selalu membutuhkan prioritas-prioritas penanganan daerah secara terpadu dalam penataan suatu daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan wilayah, agar nantinya dimasa yang akan datang tidak makin terjadi perbedaan wajah wilayah maju dengan yang tertinggal. Berikut adalah tabel 4 saran untuk menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Jombang untuk seluruh kecamatannya :

Tabel 4. Saran Kebijakan Prioritas Kabupaten Jombang.

Tingkat Hierarki	Kecamatan	Penggolongan	Saran Kebijakan
Hierarki I	Diwek, Gudo, Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Peterongan, Ploso	PKL	Perdagangan, Industri, Pariwisata, Pemerintahan, dan Pelayanan Sosial (Kota Besar)

Tingkat Hierarki	Kecamatan	Penggolongan	Saran Kebijakan
Hierarki II	Perak, dan Plandaan	PPK	Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kabupaten, Pusat Perdagangan, Industri, Pariwisata (Kota Sedang)
Hierarki III	Bandar Kedungmulyo, Kudu, Jogoroto, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Ngusikan, dan Sumobito	PPL	Pelayanan Pemerintah Tingkat Kabupaten, <i>Agro Center</i> (Kota Sedang)
Hierarki IV	Wonosalam	Hinterland	Pelayanan Sosial, <i>agro processing center</i> (Kota Kecil)
Hierarki V	Kabuh, Bareng	Hinterland	Agraris (Kota Kecil)

Sumber : Pengolahan Data, 2019

Sumarmi, (2012) mengungkapkan pembagian saran kebijakan pemerintah sesuai dengan Tabel 4. Dengan diketahuinya hierarki wilayah maka kebijakan pembangunan dapat direncanakan dan dikembangkan. Dilihat dari hierarki I, dalam RPJMD Pusat Kegiatan Lokal atau lebih mudah disebut wilayah kota dan kabupaten hanya kabupaten Jombang. Kenyataannya dalam analisis skalogram saat ini PKL tidak hanya berada di Kecamatan Jombang namun bertambang dengan Kecamatan Diwek, Gudo, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Peterongan, Ploso. Dengan demikian maka terdapat tujuh kecamatan yang siap dikembangkan menjadi pusat Perdagangan, Industri, Pariwisata, Pemerintahan, dan Pelayanan Sosial, hal ini harus dilakukan agar beban kegiatan masyarakat tidak ditopang oleh satu wilayah saja, dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan. Untuk wilayah dengan hierarki II hampir sama dalam kebijakan pembangunannya, hal yang membedakannya hanya kategori kota saja. pada Hierarki III tidak bisa

mendukung Industri maupun pariwisata, karena terkendala sarana publik, namun wilayah ini dapat menyokong pada Hierarki IV dan V tentang Pertanian, yang menjadi Pusat Pertanian, seperti perdagangan hasil tanam, pusat pembibitan dan sebagainya. Untuk Hierarki IV bisa menjadi pusat pelayanan sosial dan *agro processing center*. Pusat pelayanan sosial yang dimaksud seperti sarana pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat, sarana kesehatan seperti puskesmas, posyandu, klinik dan sebagainya. Lalu hierarki empat ini dapat digunakan sebagai pusat pemrosesan hasil pertanian dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dari produk pertanian. Yang terakhir adalah hierarki V, wilayah yang tergolong akan menjadi wilayah agraris, jadi wilayah ini digunakan sebagai wilayah pertanian saja.

Sistem perwilayahan, interaksi antar pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dibelakangnya terdapat hubungan ketergantungan satu sama lain. hubungan yang dapat diasumsikan seperti penyaluran kebutuhan makanan, pusat pemasaran komoditas produksi tiap wilayah, perdagangan industri baik sektor perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Tabel 5 menunjukkan hubungan antara hierarki dengan kekuatan daya tarik di Kabupaten Jombang:

Tabel 5. Hubungan Daya Tarik dengan Tingkat Hierarki

Kecamatan	Kekuatan Interaksi	Hierarki
Bandar KDM	Lemah	III
Perak	Sedang	II
Gudo	Lemah	I
Diwek	Sangat Kuat	I
Ngoro	Sedang	I
Mojowarno	Sedang	I
Bareng	Sedang	V
Wonosalam	Sangat Lemah	IV
Mojoagung	Sedang	I
Sumobito	Sedang	III
Jogoroto	Kuat	III
Peterongan	Sedang	I
Jombang	Sangat Kuat	I
Megaluh	Lemah	III
Tembelang	Sedang	III
Kesamben	Lemah	III
Kudu	Sangat Lemah	III

Kecamatan	Kekuatan Interaksi	Hierarki
Ploso	Lemah	I
Kabuh	Sangat Lemah	V
Plandaan	Lemah	II
Ngusikan	Sangat Lemah	III

Sumber : Pengolahan Data, 2019

Tabel 5 memberikan gambaran faktor baru tentang keterkaitan wilayah. Ada beberapa kecamatan yang nilai daya tariknya rendah namun memiliki hierarki yang termasuk tinggi seperti Plandaan, Ploso, dan Gudo. Secara perkembangan kota akan mempengaruhi wilayah yang berada disekitarnya, dan jika suatu pusat pertumbuhan sudah tidak mampu menampung pembangunan, maka pembangunan itu akan dilakukan pada daerah yang berada didekatnya. Jadi hal ini sama terhadap apa yang terjadi di ketiga wilayah kecamatan itu, karena ketiga wilayah tersebut dikelilingi oleh kecamatan dengan hierarki tinggi (Gambar 4.2) maka secara tidak langsung akan mendorong pembangunan sarana fasilitas publik, meskipun memiliki nilai daya tarik yang lemah.

Masyarakat di suatu wilayah pasti melakukan kegiatan ekonomi, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi ini akan menyumbang pendapatan daerah tiap daerahnya. Namun tiap daerah memiliki karakteristik pendapatan ekonomi yang berbeda-beda, hal ini yang menyebabkan ada sektor basis dan non basis pendapatan daerah tiap kecamatannya. Jika diambil rata - rata dari jumlah kategori basis ekonomi tiap kecamatannya maka menunjukkan angka sebesar 7.76 atau dibulatkan menjadi 8 sektor basis ekonomi, maka basis ekonomi yang harus dikembangkan di tiap kecamatannya sebagai berikut ;

Tabel 6. Kebutuhan Sektor yang Harus Di Kembangkan

Kategori	Sektor	Jumlah
C	Industri Pengolahan	1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7
G	Perdagangan Besar dan Eceran,	2

H	Reparasi mobil dan Sepeda Motor	5
I	Penyediaan Akomodasi dan Air Minum	1
J	Informasi dan Komunikasi	3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4
M,N	Jasa Perusahaan	3
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jasa Sosial Wajib	3

Sumber ; Pengolahan Data, 2019

Meskipun dari Tabel 6 sudah menjabarkan sektor pendapatan PDRB apa yang perlu dikembangkan, namun untuk dimanakan sektor ekonomi itu akan dikembangkan membutuhkan studi lebih lanjut. Dicontohkan seperti pendapatan kategori E, maka butuh analisis wilayah kembali dimanakan daerah yang memiliki sumber air bersih dengan jumlah produksi dari kategori melimpah hingga cukup. Untuk pengelolaan sampahnya karena tidak semua daerah menjadi tempat pembuangan akhir, maka diperlukan kajian khusus dimana letak daur ulang yang tepat, serta dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Jombang, begitupun untuk limbah dan daur ulang. Jadi dari data tabel tersebut masih data mentah yang butuh kajian ulang tentang kapasitas wilayah dimana tempat sektor basis ekonomi ini akan dibangun.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Hierarki Kabupaten Jombang menunjukkan 8 dari 21 kecamatan dan 2 kecamatan sebagai penopang kawasan pertumbuhan atau 47.6% wilayahnya menjadi pusat pertumbuhan. Meskipun demikian terdapat tiga wilayah yang pembangunannya tertinggal atau sekitar 14.2% yang tergolong *Hinterland* :
- Kekuatan daya tarik wilayah terbesar dimiliki oleh Kecamatan Jombang dan Diwek. Kekuatan daya tarik ini dipengaruhi karena Kecamatan Jombang ditetapkan sebagai Kota Kabupaten Jombang, yang dampaknya penduduk akan semakin padat, serta dipengaruhi juga faktor letak geografis yang

berada di tengah administrasi Kabupaten Jombang. efeknya wilayah disekitarnya akan memiliki daya tarik yang sama, ataupun setingkat dibawahnya. Efek kedua adalah wilayah kecamatan terluar akan memiliki kekuatan interaksi yang lemah, maka ketimpangan di Kabupaten Jombang sangat bisa dirasakan perbedaannya pada kekuatan interaksi sangat lemah dengan sangat kuat ;

- c) Hasil hubungan kelas Hierarki dan sektor basis ekonomi menunjukkan bahwa tingginya hierarki akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu untuk menekan kesenjangan wilayah perlunya melengkapi fasilitas publik yang ada untuk mendorong keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat untuk mendorong pendapatan daerah.

4.2 Saran

- a) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai padangan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dalam perencanaan pemerataan pembangunan wilayah, dan sebagai refrensi penyusunan RTRW dan RPJMD ;
- b) Kepada peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dalam penyusunan penelitian jika menggunakan metode yang sama, serta hasil dari penelitian ini dapat dilanjutkan menjadi penelitian baru, tentang dimana lokasi yang tepat dalam pembangunan di Kabupaten Jombang untuk mengatasi ketimpangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

BPS (2018). *"Kabupaten Jombang Dalam Angka 2018"*. Di akses dari

<https://jombangkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/547682cec346f9e6f77a6dd5/kabupaten-jombang-dalam-angka-2018.html> pada 21-02-2019.

BAPPEDA(2015). *Laporan DPRB KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015*.
Jombang. Bappeda.

- Gulo Yarman,(2012). *“Indentifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias”*. Nias. Universitas Sumatera Utara
- Peta RBI BIG (2016). *RBI Kabupaten Jombang*. Jakarta. BIG.
- MG. Endang Sri Utari (2015). *“Anaisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Di kota Yogyakarta tahun 2014”*. Yogyakarta. Jejak
- Sjafrizal, (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Depok* . PT Rajagrafindo Persada.
- Tarigan Robinson. M.R.P. (2016). *“Perencanaan Pembangunan Wilayah”*. Jakarta. Bumi Perkasa.